



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 77 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN  
HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR BIAYA UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan sehubungan dengan adanya standar satuan harga dan standar biaya umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang berlaku di Kota Batu dan untuk mengakomodir beberapa komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:

1. Nomor 96 Tahun 2019;
2. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Nomor 26 Tahun 2020; dan
4. Nomor 72 Tahun 2020.

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Standar Satuan Harga Barang/Jasa dengan kode:

<b>2.02</b>	<b>Alat Berat dan Pertukangan</b>
2.02.011	Peralatan Tukang
<b>3.03</b>	<b>Peralatan dan Jaringan Komputer</b>
3.03.018	Printer
3.03.443	Peralatan Komputer dan Jaringan Lainnya
<b>4.04</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>
4.04.429	Alat Rumah Tangga Lainnya
<b>4.05</b>	<b>Alat Pemadam Kebakaran</b>

4.05.029	Alat Pemadam Kebakaran
<b>5.06</b>	<b>Mesin Industri</b>
5.06.031	Mesin Industri
<b>6.07</b>	<b>Perlengkapan Kantor</b>
6.07.055	Kursi
6.07.056	Meja
<b>6.45</b>	<b>Peralatan</b>
6.45.436	Peralatan
<b>7.08</b>	<b>Peralatan Studio Visual</b>
7.08.076	Accessories
7.08.434	Sound System
7.08.434	Lain-lain
<b>9.12</b>	<b>Pertanian</b>
9.12.087	Bibit Tanaman
<b>9.14</b>	<b>Peternakan</b>
9.14.099	Binatang Unggas
<b>12.19</b>	<b>Bahan Habis Pakai Bahan Cetak</b>
12.19.145	Bahan Cetak
<b>13.20</b>	<b>Bahan Pakaian Dinas Pegawai</b>
13.20.158	Pakaian Dinas
<b>13.89</b>	<b>Bahan Pakaian Non Dinas</b>
13.89.542	Bahan Pakaian Non Dinas
<b>15.26</b>	<b>Peralatan Kebersihan</b>
15.26.209	Peralatan Kebersihan
15.26.210	Bak Sampah
15.26.219	Vacum Cleaner
15.26.236	Sabun
<b>16.27</b>	<b>Sewa, Pemeliharaan dan Perbaikan</b>
16.22.272	Sewa Stand dan Dekorasi
16.22.463	Perlengkapan Kelistrikan / Alat Listrik
<b>17.28</b>	<b>Perlengkapan Kendaraan</b>
17.28.525	Interior dan Eksterior Kendaraan
<b>17.60</b>	<b>Kendaraan</b>
17.60.470	Kendaraan Roda 4
17.60.524	Kendaraan Roda 3
<b>18.29</b>	<b>Bahan Bangunan</b>
18.29.302	Besi Non Beton
18.29.304	Kabel, Kawat, Kusén
18.29.351	Plitur dan Cat
18.29.352	Peralatan Air Bersih
18.29.354	Lain-Lain
18.29.402	Harga Satuan ASB Fisik
<b>19.30</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan Dinas Perhubungan</b>
19.30.361	Rambu
19.30.367	Perlengkapan PJU
19.30.432	Perlengkapan Dinas Perhubungan
<b>20.31</b>	<b>Alat dan Bahan Pertanian</b>

20.31.369	Alat/Mesin Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
20.31.454	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan
20.31.567	Ala Mesin Pertanian ( Alsintan)
<b>20.33</b>	<b>Obat-Obatan Hewan</b>
20.33.383	Sarana dan Prasarana
<b>32.35</b>	<b>Jasa Konsultasi Badan Usaha</b>
32.35.405	Jasa Konsultasi Badan Usaha
<b>33.36</b>	<b>Obat-Obatan</b>
33.36.406	Obat Generik
<b>33.37</b>	<b>Perbekalan Kesehatan</b>
33.37.408	Perbekalan Kesehatan
<b>34.38</b>	<b>Peralatan dan Jasa Dinas Kesehatan</b>
34.38.415	Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
34.38.420	Alat Kedokteran
<b>35.39</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan BPBD</b>
35.39.538	Perlengkapan BPBD
<b>35.87</b>	<b>Pakaian BPBD</b>
35.87.535	Pakaian BPBD
<b>37.41</b>	<b>Makanan dan Minuman</b>
37.41.426	Makanan dan Minuman
<b>38.44</b>	<b>Perlengkapan Tera</b>
38.44.574	Perlengkapan Tera
<b>43.57</b>	<b>Media Elektronik</b>
43.57.458	Pembuatan Jasa Vidio

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Lampiran II Standar Biaya Umum dengan kode:

<b>1.19</b>	<b>Honorarium Lain-Lain</b>
1.19.056	Honorarium lain-lain
1.19.257	Tim Terpadu Fasilitasi dan Koordinasi Konflik sosial ( FORKOPIMDA)
<b>1.82</b>	<b>Honorarium Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tenaga Harian Lepas</b>
1.82.262	Honorarium Tenga Kontrak/Honorer Daerah
<b>2.74</b>	<b>Jasa Kantor</b>
2.74.327	Jasa Kantor Lainnya
<b>8.48</b>	<b>Uang Harian</b>
8.48.147	Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur
8.48.148	Luar Wilayah Propinsi Jawa Timur

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 24 Agustus 2020

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 77/A